



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi pemerintahan daerah.

Demikian juga, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan tentang perlunya pengintegrasian sistem akuntabilitas instansi pemerintah dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan. Pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem anggaran berbasis kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Magelang Tahun 2014 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang kepada masyarakat di Kabupaten Magelang secara tertulis. Laporan ini ditujukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan maupun sasaran yang secara tegas telah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2009 - 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 - 2014.

2.1.1. VISI

Visi pembangunan daerah adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan visi pembangunan daerah, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan daerah, merupakan

suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 - 2014 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Daerah yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Magelang secara langsung untuk pertama kalinya yang akan menjabat pada periode masa jabatan tahun 2009 -2014.

Selain itu visi pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2009 - 2014 juga memperhatikan keterkaitan dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya di Kabupaten Magelang serta memperhatikan sinergitas dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan visi pembangunan daerah Kabupaten Magelang untuk masa berlaku tahun 2009 - 2014 dilakukan dengan memperhatikan visi pembangunan daerah Kabupaten Magelang untuk jangka panjang yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005 - 2025, yaitu: “Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Madani”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2009 - 2014 mengakomodasikan penekanan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pada pentahapan pembangunan jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005 - 2025.

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Magelang Tahun 2005 - 2009 (Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004), juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2009 - 2014, dalam rangka untuk menciptakan keterkaitan pelaksanaan pembangunan periode 2005 - 2009 dengan periode 2009 - 2014. Visi pembangunan daerah yang termuat dalam Renstra Kabupaten Magelang Tahun 2005 - 2009, yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Mandiri, Berdaya Saing, Madani, dan Sejahtera”.

Penyusunan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2009 - 2014, juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera”. Hal ini dimaksudkan dalam untuk menciptakan keterkaitan, keselarasan, dan keserasian pembangunan di

Kabupaten Magelang sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan pada situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, serta memperhatikan motto Kabupaten Magelang “**Gemah Ripah Iman Cemerlang**” atau “**Gemilang**” maka dirumuskan dan ditetapkan **Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2009 - 2014** yaitu:

***Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Lebih SEMANAH
(Sejahtera, Maju Dan Amanah)***

Semanah sama dengan sehati, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan antar dan inter Pimpinan Pemerintahan Daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakat Kabupaten Magelang untuk mewujudkan **Kabupaten Magelang yang lebih Sejahtera, Maju, dan Amanah (Semanah)**.

Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Magelang, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil) secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa, kondisi masyarakat yang sejahtera ditunjukkan dengan masyarakat yang *wareg*, *wutuh*, *waras*, dan *wasis*; yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pangan (*wareg*), sandang dan papan (*wutuh*), terjamin kesehatan jasmani-rohani (*waras*), dan masyarakat yang cerdas (*wasis*).

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang untuk kurun waktu 2009 - 2014 adalah: Pertumbuhan Ekonomi; PDRB Per Kapita; Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional; Persentase Koperasi dan UMKM Aktif; Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Per 1.000 Penduduk; dan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar; Indeks Gini; Angka Partisipasi Murni; Angka Partisipasi Kasar; Angka Kelangsungan Hidup Bayi; Angka Usia Harapan Hidup; Persentase Penduduk Miskin; dan Rasio Penduduk Bekerja.

Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, dan (2) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Maju. Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi fisik dan non fisik yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama yang sinergis dan kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang untuk kurun waktu 2009 -2014 adalah: Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan; Ketaatan Terhadap RTRW; Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih; Rasio Ketersediaan Daya Listrik; Rasio Kesenjangan Wilayah; Persentase Penanganan Sampah; Persentase Penduduk Berakses Air Minum; Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik; Rasio Jaringan Irigasi; Rasio Permukiman Layak Huni; Persentase Kawasan Kumuh; Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB; Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis; dan Persentase Pertambangan Tanpa Ijin/Liar.

Daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Amanah. Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang senantiasa mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik diberbagai bidang (agama, sosial, hukum, ekonomi, politik, dan budaya) yang melibatkan semua elemen masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilandasi oleh semangat amanah merupakan kunci terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, lahir dan batin.

Sebagai ukuran tercapainya tingkat pemerintahan Kabupaten Magelang yang amanah untuk kurun waktu 2009 - 2014, digunakan beberapa indikator kinerja kunci sebagai berikut: Lama Proses Perijinan, Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah, Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi, Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa,

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda, dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih amanah akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Penciptaan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis, (2) Penciptaan masyarakat yang aman dan tenteram.

2.1.2. M I S I

Pengertian misi menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut:

- MISI 1** : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama.
- MISI 2** : Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing.
- MISI 3** : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah.
- MISI 4** : Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup.
- MISI 5** : Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.
- MISI 6** : Menciptakan Masyarakat yang Aman dan Tenteram.

2.1.3. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Pengertian *tujuan* menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa *strategi* adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada angka 15 disebutkan bahwa *kebijakan* adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sedangkan *program* adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan visi dan misi, maka Kabupaten Magelang menetapkan tujuan. Dalam menetapkan tujuan dikelompokkan berdasarkan masing-masing misi dengan mengakomodasi tujuan bidang strategis yang terpilih.

a) Tujuan

Dalam rangka pengembangan kemampuan Pemerintah Kabupaten Magelang ini akhirnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 - 2014 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana daerah.
4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.
- 7.

b) **Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan).

Sasaran sebaiknya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif sehingga mudah diukur karena sasaran harus memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, rinci, dapat dicapai dan terukur.

MISI 1 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama.

Tujuan 1 :

- Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama

Sasaran 1.1 :

1.1.1 Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.

Programnya terdiri dari:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 3) Pendidikan Menengah
- 4) Pendidikan Non Formal
- 5) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 6) Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 7) Pendidikan Berkelanjutan
- 8) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.1.2 Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan.

Programnya terdiri dari:

- 1) Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Perbaikan Gizi Masyarakat
- 6) Pengembangan Lingkungan Sehat
- 7) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 8) Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 9) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- 10) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- 11) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 12) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit
- 13) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 14) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- 15) Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- 16) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- 17) Pengembangan Lingkungan Sehat
- 18) Manajemen Pelayanan Kesehatan

1.1.3 Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang sehingga mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global.

Programnya terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 2) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 3) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- 4) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- 5) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
- 6) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- 7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- 8) Kesehatan Reproduksi Remaja
- 9) Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
- 10) Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR

1.1.4 Makin berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Programnya terdiri dari:

- 1) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 2) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 3) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 4) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- 5) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PKS, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- 1.1.5 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
Programnya terdiri dari:
- 1) Keluarga Berencana.
 - 2) Pelayanan Kontrasepsi
- 1.1.6 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
Programnya terdiri dari:
- 1) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan
 - 2) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - 3) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - 4) Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak
- 1.1.7 Berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
Programnya terdiri dari:
- 1) Penanggulangan Kemiskinan
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
 - 3) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - 4) Peningkatan kelembagaan masyarakat pedesaan
 - 5) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- 1.1.8 Makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila. Programnya terdiri dari:
- 1) Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan
 - 2) Peningkatan Pembinaan kepada Masyarakat di Bidang Keagamaan
 - 3) Pengelolaan Keragaman Budaya.
 - 4) Pengembangan Nilai Budaya
 - 5) Pengelolaan Kekayaan Budaya

MISI 2 : Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing.

Tujuan 2:

- Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Sasaran 2.1:

2.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka menengah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang cukup maju di Indonesia.

Programnya terdiri dari:

- 1) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 2) Penataan Struktur Industri
- 3) Peningkatan Kesempatan Kerja.
- 4) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 5) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.1.2 Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.

Programnya terdiri dari:

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- 2) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 3) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- 4) Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
- 5) Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- 6) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 7) Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kondusif
- 8) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

2.1.3 Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu.

Programnya terdiri dari:

- 1) Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 2) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 3) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

2.1.4 Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.

Programnya terdiri dari:

- 1) Peningkatan Ketahanan Pangan

- 2) Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 - 3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
 - 4) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
 - 5) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
 - 6) Pengembangan Agribisnis
 - 7) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
 - 8) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - 9) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - 10) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - 11) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - 12) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - 13) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar
- 2.1.5 Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Programnya adalah:

- 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- 2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 3) Pengembangan Kemitraan
- 4) Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- 5) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 6) Peningkatan Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana Perikanan
- 7) Pengembangan Sumberdaya Perikanan

MISI 3 : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah.

Tujuan 3:

- Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah

Sasaran 3.1 :

- 3.1.1 Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

Programnya adalah:

- 1) Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

- 2) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong
- 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 4) Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 5) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- 7) Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi
- 8) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah
- 9) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 10) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- 11) Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi
- 12) Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
- 13) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ
- 14) Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
- 15) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

3.1.2 Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni.

Programnya adalah:

- 1) Pengembangan Perumahan
- 2) Lingkungan Sehat Perumahan
- 3) Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial
- 4) Peningkatan Pengelolaan Sistem Pertamanan
- 5) Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan
- 6) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

3.1.3 Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Programnya adalah:

- 1) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan
- 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

MISI 4 : Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup.

Tujuan 4 :

- Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup

Sasaran 4.1 :

4.1.1 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global.

Programnya terdiri dari:

- 1) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- 4) Peningkatan Pengendalian Polusi
- 5) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 6) Pengembangan Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup
- 7) Pengembangan Kapasitas dan Pengendalian dampak Lingkungan
- 8) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Kapasitas Laboratorium
- 9) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 10) Rehabilitasi Hutan dan Lahan

4.1.2 Meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.

Programnya terdiri dari:

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

4.1.3 Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Programnya terdiri dari:

- 1) Pengendalian Geologi Daerah

4.1.4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.

Programnya terdiri dari:

- 1) Perencanaan Tata Ruang
- 2) Pemanfaatan Ruang
- 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

MISI 5 : Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

Tujuan 5 :

- Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis

Sasaran 5.1 :

5.1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Programnya terdiri dari :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- 3) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 4) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 5) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 6) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
- 8) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
- 10) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 11) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 12) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 13) Jasa Konstruksi
- 14) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

5.1.2 Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah.

Programnya terdiri dari:

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat
- 2) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 3) Peningkatan Manajemen Kepegawaian
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 6) Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- 7) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - 8) Penataan Kelembagaan Desa dan Perangkat Desa
 - 9) Penataan kewenangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat. Programnya terdiri dari:
- 1) Penataan Administrasi Kependudukan
 - 2) Pengembangan Data/Informasi
 - 3) Kerjasama Informasi dengan Mass Media
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
 - 5) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - 6) Jasa Konstruksi
 - 7) Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- 5.1.4 Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan.
- Programnya terdiri dari:
- 1) Pengembangan data/Informasi/ Statistik Daerah
- 5.1.5 Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- Programnya terdiri dari:
- 1) Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - 2) Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - 3) Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
- 5.1.6 Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik.
- Programnya terdiri dari:
- 1) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 5.1.7 Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
- Programnya terdiri dari:
- 1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
 - 2) Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan

- 3) Perencanaan Tata Ruang
 - 4) Kerjasama Pembangunan
- 5.1.8 Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Programnya terdiri dari:

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 3) Perencanaan Sosial Budaya
- 4) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

MISI 6 : Menciptakan Masyarakat yang Aman dan Tenteram.

Tujuan 6:

- terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram

Sasaran 6.1:

- 6.1.1 Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Programnya terdiri dari:

- 1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Pendidikan Politik Masyarakat
- 3) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 4) Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- 6.1.2 Meningkatnya kewaspadaan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi dan situasi bencana.

Programnya terdiri dari:

- 1) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

- 6.1.3 Mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

Programnya terdiri dari:

- 1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 2) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 3) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

2.2. Penetapan Kinerja

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2014 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun bersangkutan. Penetapan Kinerja ini pada hakikatnya adalah komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2014.

Tujuan penyusunan Penetapan Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel yang kami sajikan berikut merupakan Penetapan Kinerja Kabupaten Magelang Tahun 2014:

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN**

KABUPATEN : MAGELANG
TAHUN ANGGARAN : 2014

Misi I : Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1. Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan	Urusan : Kesehatan		
	1.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95%
	2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95%
	3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93%
	4.	Cakupan pelayanan nifas	90%
	5.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90%
	6.	Cakupan kunjungan bayi	90%
	7.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%
	8.	Cakupan pelayanan anak balita	90%
	9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%
	10.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
	11.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:	
	12.	<i>Acute Flacid Paralysis</i> rate per 100.000	5%
13.	Cakupan balita dengan pnemonia yang ditangani	80%	
14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	15. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%
	16. Penemuan penderita diare	90%
	17. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%
	18. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	14%
	19. Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan RS di kabupaten/kota	100%
	20. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang melakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
	21. Cakupan Desa Siaga Aktif	100%
2. Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
	1. Cakupan peserta KB aktif	81%
	2. Tingkat prevalensi peserta KB aktif	77%
	3. Tingkat prevalensi kesertaan KB pria	2%
	4. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	43%
	5. Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	100%
	6. Bina Keluarga Balita	81,50%
3. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan teknologi di berbagai bidang, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kompetisi nasional/global	Urusan : Kepemudaan dan Olahraga	
	1. Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk	0,052 per
	Urusan : Perpustakaan	
	1. Keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	46.925
	2. Persentase pengunjung perpustakaan	3,5%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4. Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak	Urusan : Pendidikan	
	1. Pendidikan Usia Dini (PAUD)	300
	2. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf	99,74%
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	98,45%
	4. APM SMP/MTs	89,04%
	5. APM SMA/MA/SMK	35,40%
	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	104,50%
	7. APK SMP/MTs	96,20%
	8. APK SMA/MA/SMK	47,60%
	9. Angka Mengulang (AM) SD	8,25%
	10. AM MI	5,30%
	11. AM SMP	0,20%
	12. AM MTs	0,30%
	13. AM SMA	0,40%
	14. AM MA	1,20%
	15. AM SMK	0,45%
	16. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,10%
	17. APS SMP/MTs	1,01%
	18. APS SMA/MA/SMK	0,91%
	19. Angka Kelulusan (AL) SD Negeri/Swasta	99,40%
	20. AL MI Negeri/Swasta	99,05%
	21. AL SMP Negeri/Swasta	93,43%
	22. AL MTs Negeri/Swasta	78,83%
23. AL SMA Negeri/Swasta	94,44%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
	24.	AL MA Negeri/Swasta	78,42%
	25.	AL SMK Negeri/Swasta	95,15%
	26.	Guru memenuhi Kualifikasi S1/D.4	5.628
5. Makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, berkahlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila	Urusan : Kebudayaan		
	1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	36 Kali
	2.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	18 Sarana
	3.	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	600 Buah
6. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	38%
	2.	Persentase Angka Melek Huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	100%
	3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	60%
7. Makin berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Urusan : Sosial		
	1.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	32 Buah
	2.	Persentase penanganan PMKS	0,20%
	3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	0,20%
	4.	Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,35%
	5.	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	6. Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	5%
	7. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	50%
	8. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0,90%

Misi II : Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing

8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka menengah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan dengan kabupaten/kota yang cukup maju di Indonesia	Urusan : Ketenagakerjaan		
	1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	75%
	2.	Persentase pekerja yang ditempatkan	7,5%
	Urusan : Industri		
	1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	18,51%
	2.	Produktivitas sektor industri	80%
	3.	Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor	85%
9. Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu	Urusan : Penanaman Modal		
	1.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	75%
10. Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasmbada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat	Urusan : Ketahanan Pangan		
	1.	Ketersediaan bahan pangan (beras)	18.796 Ton
	2.	Konsumsi dan keamanan pangan	83,07%
	3.	Distribusi pangan	121,20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Urusan : Perikanan	
	1. Jumlah produksi perikanan (benih) ribuan/ekor	1.050.000
	2. Jumlah produksi perikanan lauk (Kg)	13.750.000
	3. Jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg/tahun)	14,40%
	Urusan : Pertanian	
	1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	59,90
	2. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	27,50%
	11. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditas berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian	Urusan : Koperasi dan UKM
1. Persentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi		76%
2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil		80%
Urusan : Perdagangan		
1. Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB		16,09%
2. Ekspor bersih perdagangan (US x 1000)	85.000.000	
12. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah	Urusan : Pariwisata	
	1. Jumlah kunjungan wisata	3.900.000
	2. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi III : Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah		
13. Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Urusan : Perhubungan	
	1. Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	17,0%
14. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru	Urusan : Pekerjaan Umum	
	1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	70%
	2. Persentase luas irigasi kabupaten baik	57,02%
	3. Persentase rumah tangga bersanitasi	81%
	4. Persentase kawasan yang masih terjadi genangan	0%
	Urusan : Energi dan Sumber Daya Mineral	
	1. Persentase Pertambangan tanpa ijin/liar	30%
2. Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	2,83%	
15. Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni	Urusan : Perumahan	
	1. Persentase kawasan kumuh	2,00%
	2. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	60%
	3. Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh	5%
16.	4. Rasio Rumah Layak Huni	78%
Misi IV : Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup		
17. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam	Urusan : Tata Ruang	
	1. Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	20%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
18. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global	Urusan : Lingkungan Hidup	
	1. Persentase penanganan sampah	19%
	2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	75%
	3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,40%
	4. Pengelolaan limbah B3	80%
	5. Pengelolaan limbah B3 yang diawasi	60%
	6. Penegakan hukum lingkungan	60%
	7. Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)	100%
	8. Pengendalian potensi sumber pencemaran air	60%
	9. Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/danau secara berkala	100%
	10. Pelaksanaan penetapan status mutu air	9%
	11. Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan	95%
Urusan : Kehutanan		
1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	2.450 Ha	
2. Kerusakan Kawasan Hutan	3%	

Misi V : Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis

19. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih	Urusan : Statistik	
	1. Penyusunan Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada
	2. Penyusunan Buku “PDRB Kabupaten”	Ada
	Urusan : Kearsipan	
1. Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku	82%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
	2. Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan	100	
	Urusan : Pertanahan		
	1. Persentase luas lahan bersertifikat	33,65%	
	2. Persentase penyelesaian Kasus tanah negara	100%	
	3. Persentase penyelesaian Izin Lokal	80%	
20. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung <i>stakeholders</i> (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum	Urusan : Otonomi Daerah		
	1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	8 Buah	
	2. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	
21. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Urusan : Pembangunan Daerah		
	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	
	2. Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	
	3. Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Pekada	Ada	
	4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	
22. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil		
	1. Persentase kepemilikan KTP	85%	
	2. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	25%	
	3. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Urusan : Komunikasi dan Informatika	
	1. Website milik pemerintah daerah	Ada

Misi VI : Menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram

23. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
	1. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	6 kali
	2. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6 kali
	3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	100%
	4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman,	80%

